

KEKUASAAN SEBAGAI KEKUATAN “OMNIPRESENT”

Penyelidikan Filosofis tentang Konsep Kekuasaan Menurut

Michel Foucault

Costantinus Fatlolon, SS., MA

Dosen Filsafat STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon

ABSTRACT

In these modern times we can see a dominance of “juridical-discursive” power. This “juridical-discursive” power is exclusively based on law and prohibition, censure, obedience and uniformity of those in power. Foucault recommends a new vision by arguing that power is a multiplicity of connections of force, a process in human relations, and also an aid which at the same time is a strategy which is carried out in certain communities. This power yields everything time and again, it has its source from everywhere and has connections with everything. This power is an *omnipresent* force. Foucault places power at inter-human relationship. Nevertheless, there is a weakness in Foucault’s vision, since he puts forward an identification of power-law-monarchy. With this identification, he disregards factual progress of the democratic community.

KATA-KATA KUNCI:

Kekuasaan, Omnipresent, Filosofis, Michel Foucault

Pendahuluan

Diskursus tentang konsep kekuasaan dibahas oleh berbagai disiplin ilmu, seperti ilmu politik, ilmu sosiologi, dan filsafat. Pada umumnya para ahli memahami kekuasaan secara luas sebagai sebuah *seni* untuk mengatur kehidupan dan tata pemerintahan dengan baik agar menghasilkan kebaikan dan kesejahteraan bagi banyak orang. Ada pula sebagian ahli memahami kekuasaan secara sempit sebagai *kekuatan* yang dimiliki oleh individu

atau kelompok untuk mencapai tujuan dan maksud tertentu. Pemahaman demikian menempatkan kekuasaan dalam relasi dengan kemampuan individu dan institusi untuk mengatur individu atau kelompok lain dalam menggapai maksud dan tujuan tertentu.

Michel Foucault (15 Oktober 1926 – 25 Juni 1984) memahami kekuasaan atas cara yang lain. Ia menempatkan kekuasaan dalam relasi sosial manusia dan tidak terbatas hanya pada individu atau institusi tertentu. Dalam analisis tentang bagaimana kekuasaan itu bekerja, Foucault menyimpulkan bahwa kekuasaan merupakan sebuah kekuatan yang ada di mana-mana, ada dalam setiap jalinan relasi manusiawi dan bertalian dengan semua hal. Kekuasaan, dengan demikian, bersifat *omnipresent*.

Tulisan ini membahas secara terbatas pemikiran Foucault tentang kekuasaan. Pertanyaan sentral yang ingin dijawab dalam tulisan ini ialah: “Apakah yang dimaksudkan oleh Foucault dengan kekuasaan sebagai kekuatan *omnipresent*? Untuk menjawab pertanyaan ini, pertama-tama akan dipaparkan kritik Foucault terhadap konsep kekuasaan “yuridis-diskursif” (*Juridico-Discursive*). Bagian kedua akan memaparkan pemahaman Foucault tentang kekuasaan yang menunjukkan kebaruan konsepnya. Pada bagian ketiga akan diberikan evaluasi dan relevansi pemikiran Foucault tentang kekuasaan.

1. Kritik Foucault terhadap Konsep Kekuasaan “Yuridis-Diskursif”

Foucault mengawali kritiknya terhadap konsep kekuasaan “yuridis-diskursif” dengan menganalisis represi “seksualitas”¹ dalam sejarah

¹Menurut Foucault, seksualitas (*sexualite*) merujuk pada nama yang dapat diberikan kepada suatu sistem historis. Ia bukanlah sebuah realitas bawaan yang

masyarakat Eropa. Ia membangun analisisnya pertama-tama pada ide-ide radikal dari teori kritik sosial, seperti teori sosial dari Wilhelm Reich (1897-1957) dan Herbert Marcuse (1898-1979), serta mensintesis dengan teori psikoanalisa Sigmund Freud (1856-1939) dan teori materialisme dialektis Karl Marx (1818-1893).

Menurut Foucault, pada awal abad ke-17 masalah seksualitas secara relatif dapat diperbincangkan secara terbuka oleh masyarakat, bahkan praktek seksual tidak banyak dirahasiakan oleh masyarakat.² Ia menyaksikan bahwa, di satu pihak, pada tataran personal, terdapat tindakan represif secara negatif terhadap masalah seksualitas. Namun, di lain pihak, pada tataran sosial, represi terhadap seksualitas muncul bersamaan dengan perkembangan masyarakat industri dan masyarakat kapitalis yang mentransformasikan energi seksualitas kepada kerja produktif.

Pada “masyarakat Victorian”³ seksualitas diatur dan dialihkan ke dalam lingkup rumah tangga hanya sebagai sebuah fungsi reproduksi.

sulit ditangkap melainkan jaringan luas di permukaan tempat rangsangan badaniah, intensifikasi kenikmatan, dorongan terbentuknya wacana, pembentukan pengetahuan, pengokohan pengawasan dan tantangan, dan berkaitan dengan strategi pengetahuan dan kekuasaan. Michel Foucault, *Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas*, terj. Yayasan Obor Indonesia, FIB Universitas Indonesia dan Forum Jakarta-Paris (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 1976), 206.

²Michel Foucault, *The History of Sexuality*, vol. 1, *An Introduction*, trans. Robert Hurley (New York: Pantheon Books, 1978), 3.

³Masyarakat Victorian (*les Victoriens*) adalah masyarakat yang dipengaruhi oleh pengendalian tingkah laku ala Ratu Victoria I (1819-1901). Ratu ini tidak hanya mengendalikan kerajaan tetapi juga tingkah laku masyarakatnya... Bagi kaum Victorian, termasuk di dalamnya masyarakat Eropa Daratan, kesantunan puritan sangat penting sehingga tindakan seksual tidak hanya dikekang oleh sopan santun tetapi juga ditolak dan dibungkam. Namun karena hal ilegal ini

Akibatnya, masyarakat hanya membisu terhadap seksualitas. Kebisuan ini lalu menjadi sebuah hukum. Hukum ini menjadi sebuah model, norma dan kebenaran bagi pasangan nikah dan keluarga mereka. Ruang tidur orang tua kemudian dipahami hanya sebagai sebuah tempat khusus untuk melakukan “seks”.⁴ Foucault mengatakan bahwa situasi ini menunjukkan bahwa represi dilaksanakan dan diafirmasi sedemikian rupa sehingga seks dan seksualitas tidak tampak dan tidak diwacanakan, tidak diketahui.⁵

Represi seksual lebih intensif dapat ditemukan dalam praktek pelayanan pastoral Gereja Katolik dan praktek Sakramen Tobat sesudah Konsili Trente (1543-1563). Menurut Foucault, sesudah Konsili ini ada evolusi dari “pengakuan dosa atas pelanggaran-pelanggaran seksual” (*the confession of sexual transgressions*) menuju “pengakuan dosa atas keinginan” (*the confession of desire*) untuk melakukan pelanggaran seksual. Dalam praktek Sakramen Tobat, khususnya pengakuan dosa, setiap orang dituntut untuk tidak hanya mengakui perbuatan melanggar hukum Tuhan, melainkan juga mengubah keinginan seksual menjadi sebuah wacana, dengan mempergunakan kata-kata yang netral. Tindakan pastoral ini, dengan demikian, menyatakan secara hakiki tugas pokok

tidak mungkin dilarang sepenuhnya maka disediakan tempat khusus, yaitu rumah pelacuran atau rumah sakit jiwa. Lih. Michel Foucault, *Ingin Tahu: Sejarah Seksualitas*,... Ibid., 204.

⁴Menurut Foucault, seks (*sexe*) bukan wujud real dan tunggal yang sesuai dengan berbagai definisi yang diberikan kepadanya dalam wacana. Seks bukanlah realitas awal melainkan dibawah secara historis oleh seksualitas. Ibid., 206.

⁵Michel Foucault, *The History of Sexuality*,... Ibid., 4.

untuk menghindarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan seks melalui praktek kata-kata yang tiada habisnya.⁶

Selanjutnya pada abad ke-18 dan abad ke-19 ketika kekuasaan kerajaan monarki yang absolut mengalami krisis, kerajaan-kerajaan ini menjadikan diri mereka sebagai sistem-sistem hukum, mengungkapkan diri melalui teori-teori hukum dan membuat mekanisme-mekanisme kekuasaan dalam bentuk hukum. Dalam arti ini, sejarah monarki menutup fakta-fakta dan prosedur-prosedur kekuasaan melalui wacana yuridis-politis (*juridico-political discourse*).⁷

Penjelasan tentang sejarah seksualitas di atas dimaksudkan Foucault untuk menunjukkan bahwa dalam sejarah masyarakat Barat, secara esensial, kekuasaan tidak bersifat represif dan bertentangan dengan keinginan seksual, melainkan keduanya saling bergandengan tangan dan seiring sejalan. Karena itu Foucault mengatakan bahwa dimana ada keinginan, di situ pula relasi kekuasaan sudah ada. Kekuasaan itu bersifat ilusif dan sombong sekaligus. Kekuasaan itu ilusif karena mengecam represi seksualitas sesudah suatu kejadian berlangsung. Namun kekuasaan itu juga bersifat sombong karena mempertanyakan keinginan yang berada di luar jangkauan kekuasaan itu sendiri.⁸ Dengan latar belakang pemikiran ini, Foucault berusaha untuk membebaskan hakekat kekuasaan dari konsep yuridis-diskursif.

Pertanyaan yang masih harus dijawab ialah apakah yang dimaksudkan dengan kekuasaan yuridis-diskursif? Menurut Foucault,

⁶Ibid., 12.

⁷Ibid., 88.

⁸Ibid., 80-81.

kekuasaan yuridis-diskursif adalah paham kekuasaan yang menjustifikasi dua realitas sekaligus yakni “represi” dan “teori hukum”.⁹ Konsep kekuasaan sedemikian menurut Foucault mengandung pemahaman yang kontradiktoris. Menurut Foucault, di satu pihak, sejauh konsep ini menganggap kekuasaan sebagai sesuatu yang bersifat eksternal terhadap keinginan, maka akan mengantarkan kepada “pembebasan”. Sebaliknya, di lain pihak, sejauh konsep ini memandang kekuasaan sebagai bagian konstitutif dari keinginan itu sendiri, hal ini akan menghantar kepada “afirmasi” atau peneguhan dimana orang selalu dan sudah terperangkap olehnya.¹⁰ Karena itu, setiap orang yang bekerja pada ranah politik akan selalu bertemu dengan kekuasaan yuridis-diskursif karena kekuasaan ini telah melekat dalam sejarah masyarakat Barat.

Dalam analisisnya tentang kekuasaan yuridis-diskursif, Foucault menemukan 5 ciri mendasar yang melekat pada konsep ini. Pertama, relasi negatif (*the negative relation*). Ciri khas ini berada di antara kekuasaan dan seks. Menurut Foucault, seks selalu merupakan sesuatu yang menghalangi atau membatasi kekuasaan karena dimana ada seks dan kesenangan, kekuasaan tidak dapat melakukan apa-apa selain mengatakan tidak. Walaupun kekuasaan dapat melakukan sesuatu, perbuatan itu dianggap tidak ada dan tidak ada hubungan dengan apa yang terjadi.¹¹

Kedua, dalam konsep ini terdapat “desakan dari aturan” (*the insistence of the rule*). Ciri khas ini mengindentikan kekuasaan dengan hukum. Bagaimana caranya kekuasaan itu dijalankan dan bagaimana

⁹Ibid., 82.

¹⁰Ibid., 83.

¹¹Ibid.

kekuasaan itu memperlakukan serta memahami seks, tergantung pada aturan hukum. Seks dengan demikian ditempatkan dan diterjemahkan oleh kekuasaan dalam konteks hukum. Kekuasaan sedemikian mempertahankan seks melalui bahasa, atau bahkan menciptakan sebuah wacana yang menjadi sebuah aturan hukum.

Ketiga, konsep ini membawa dalam dirinya “lingkaran larangan” (*the cycle of prohibition*). Ciri khas ini, menurut Foucault, menunjukkan bahwa kekuasaan bertugas hanya untuk melarang atau mengontrol atau mengekang seks. Hukum ini tidak lain adalah sebuah hukum larangan dimana seks menolak dirinya sendiri karena penindasan terhadap seks itu sendiri adalah sebuah hukuman.¹²

Keempat, kekuasaan ini memiliki “the logic of censorship”. Dengan istilah ini Foucault memaksudkan bahwa kekuasaan menolak dan menyangkal keberadaan seks karena kekuasaan tersebut memiliki mekanisme penyaringan sendiri yang melarang orang untuk membicarakan sesuatu (seks) yang tidak ada. Karena itu Foucault mengatakan bahwa logika kekuasaan yang diberikan kepada seks merupakan logika dari sebuah hukum yang bersifat paradoksial karena dapat dinyatakan sebagai perintah terhadap apa yang tidak ada, terhadap apa yang tidak dinyatakan dan terhadap apa yang didiamkan.¹³

¹²Dikatakan oleh Foucault: “Renounce yourself or suffer the penalty of being suppressed; do not appear if you do not want to disappear. Your existence will be maintained only at the cost of your nullification. Power constrains sex only through a taboo that plays on the alternative between two non existences.” Ibid., 84.

¹³Ibid.

Kelima, kekuasaan ini menekankan “keseragaman aparatus” (*the uniformity of the apparatus*). Menurut Foucault, kekuasaan beroperasi dalam bentuk yang sama pada semua institusi, dari atas sampai ke bawah. Kekuasaan juga bekerja dalam sebuah bentuk yang seragam dan menyeluruh, serta menghasilkan mekanisme hukum, tabu dan sensor. Bentuk hukum sedemikian merupakan bentuk hukum pelarangan dan penghukuman yang berhubungan dengan apa yang halal dan apa yang tidak halal. Karena itu, siapapun yang menganut hukum ini akan memahami kekuasaan dalam bentuk yuridis dan menerima semua efeknya dengan sikap ketaatan.¹⁴

Menurut Foucault, masyarakat-masyarakat modern telah menerima kekuasaan yuridis-diskursif karena dapat ditoleransi. Maksud Foucault ialah kekuasaan ini memiliki kemampuan untuk menyembunyikan mekanismenya untuk memaksakan kerahasiaan kepada orang lain, namun pada saat yang sama tidak dapat memutuskan diri dari orang lain. Sejak Monarki Abad Pertengahan, aturan hukum menyejajarkan dirinya dengan kekuasaan dan menghadirkan dirinya sebagai agen regulasi, arbitrase dan demarkasi. Lebih dari itu, kekuasaan mengidentikan dirinya hukum dan bertindak melalui mekanisme-mekanisme interdiksi dan sanksi. Foucault kemudian menyimpulkan bahwa hukum bukan hanya senjata yang secara terampil dikerahkan oleh raja melainkan merupakan bentuk manifestasi dari sistem monarki.¹⁵

¹⁴Ibid., 84-85.

¹⁵Ibid., 87.

2. Konsep Foucault tentang Kekuasaan sebagai Kekuatan “Omnipresent”

Foucault telah mengkritik konsep kekuasaan yuridis-diskursif sebagai konsep yang tidak dapat berbuat apapun selain melarang, menghukum dan menuntut ketaatan pada aturan hukum. Kekuasaan sedemikian pada intinya sama dengan hukum, dan hukum tidak lain adalah kedaulatan kekuasaan. Pertanyaan sekarang ialah: apakah yang dimaksudkan Foucault dengan kekuasaan? Apakah yang dimaksudkan dengan kekuasaan sebagai kekuatan *omnipresent*? Dan mengapa kekuasaan itu harus *omnipresent*?

Foucault mengungkapkan bahwa istilah “kekuasaan” sering kali menghantar kita kepada sejumlah pemahaman yang salah tentang hakekat, bentuk dan kesatuan dari kekuasaan. Menurutnya, kekuasaan bukan merupakan sebuah ketaatan warga masyarakat kepada institusi, bukan pula sebuah bentuk ketaklukan kepada hukum, atau sistem dominasi umum dari suatu kelompok terhadap kelompok lain. Karena itu, untuk menganalisis kekuasaan, kita tidak harus mengasumsi bahwa kedaulatan negara, bentuk hukum atau kesatuan semua bentuk dominasi harus menjadi unsur kekuasaan itu. Semua unsur dimaksud hanyalah bentuk-bentuk akhir yang diperlukan oleh kekuasaan.¹⁶

Kekuasaan, menurut Foucault, merupakan (1) multiplisitas dari kekuatan relasi-relasi; (2) kekuasaan merupakan sebuah proses dalam berbagai relasi; (3) kekuasaan adalah sebuah dukungan, dan (4) kekuasaan

¹⁶Ibid., 92.

adalah sebuah strategi.¹⁷ Melalui definisi ini, Foucault hendak menunjukkan bahwa kekuasaan bukanlah sebuah institusi atau struktur, melainkan sebuah kekuatan spesifik yang digunakan oleh manusia dalam situasi tertentu dengan strategi kompleks dalam masyarakat tertentu. Kekuasaan ini menghasilkan apa saja dari saat yang satu ke saat yang lain, berasal dari mana saja dan berhubungan dengan semua hal. Berdasarkan pemahaman ini Foucault mengatakan bahwa kekuasaan itu pada hakekatnya adalah *omnipresent* atau ada di mana-mana.

Pertanyaan lanjut ialah mengapa kekuasaan itu ada di mana-mana? Foucault menjelaskan bahwa kekuasaan itu *omnipresent* bukan karena ia memiliki hak istimewa untuk mengkonsolidasikan segala sesuatu di bawah kekuatannya yang tidak kelihatan. Sebaliknya, kekuasaan itu *omnipresent* karena dihasilkan dari satu titik ke titik yang lain, di setiap titik, atau lebih tepatnya di setiap hubungan dari satu titik ke titik yang lain. Selain itu, kekuasaan *omnipresent* bukan karena mencakup segala sesuatu, melainkan karena ia datang dari mana-mana.¹⁸

Bertitik tolak dari pemahaman ini, Foucault menambahkan lima hal penting yang harus diperhatikan dalam memahami kekuasaan sebagai

¹⁷Secara jelas Foucault menjelaskan konsep kekuasaannya itu sebagai berikut: “It is seems to me that power must be understood in the first instance as the multiplicity of force relations immanent in the sphere in which they operate and which constitute their own organization; as the process which, through ceaseless struggles and confrontations, transforms, strengthens, or reverses them; as the support which these force relations find in one another, thus forming a chain or a system, or on the contrary, the disjunctions and contradictions which isolate them from one another; and lastly, as the strategies in which they take effect, whose general design or institutional crystallization is embodied in the state apparatus, in the formulation—of the law, in the various social hegemonies”. Ibid.

¹⁸Ibid., 93.

kekuatan *omnipresent*. Pertama, kekuasaan bukanlah sebuah benda yang dapat dimiliki atau tidak dimiliki oleh seseorang atau yang diberikan kepada seseorang. Dalam bahasa Foucault, kekuasaan tidak dapat “diperoleh, disita, atau dibagi, sesuatu yang dapat pertahankan atau dibiarkan oleh seseorang untuk berlalu”.¹⁹ Sebaliknya, kekuasaan dipraktekkan dari satu titik ke titik yang lain dalam relasi manusiawi dalam bentuk apapun.²⁰ Kedua, kekuasaan bukanlah sebuah proses ekonomi luar biasa, bukanlah relasi-relasi pengetahuan dan relasi-relasi seksual. Sebaliknya, kekuasaan bersifat permanen dalam relasi-relasi ini dan menyatakan struktur internal relasi tersebut. Ketiga, kekuasaan tidak berasal dari atas melainkan berasal dari bawah; kekuasaan tidak memiliki hubungan dengan yang memerintah atau yang diperintah oleh bentuk relasi kekuasaan manapun. Kekuasaan ini independen terhadap semua kekuasaan yang memerintah.

Keempat, relasi-relasi kekuasaan bersifat intensional dan non-subyektif. Kedua karakteristik ini, dalam kenyataan, dapat dipahami karena dilaksanakan berdasarkan kalkulasi terhadap “serangkaian tujuan dan sasaran tertentu”.²¹ Walaupun kita mungkin dapat mengidentifikasi rencana-rencana dan strategi-strategi dalam relasi-relasi kekuasaan, namun tidak ada seorangpun dapat menjalankan kekuasaan ini. Relasi-relasi kekuasaan memiliki rasionalitas sendiri yang dicirikhaskan oleh taktik-

¹⁹Ibid., 94.

²⁰Michel Foucault, “Afterword. The Subject and Power,” dalam Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow, *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics*, 2nd edition, with An Afterword by and An Interview with Michel Foucault (Chicago: The University of Chicago Press, 1982), 216-220.

²¹Michel Foucault, *The History of Sexuality...*, 95.

taktik sehingga tidak ada seorang pun yang dapat mengarahkan hubungan-hubungan ini.

Kelima, perlawanan merupakan bagian dari kekuasaan dan bersifat imanen dalam kekuasaan. Dengan penegasan ini Foucault maksudkan bahwa di mana ada kekuasaan, di sana ada perlawanan. Atau lebih tepat, perlawanan tidak pernah berada pada posisi eksternal terhadap kekuasaan melainkan senantiasa ada di mana-mana dalam keterjalinan dengan kekuasaan. Menurut Foucault, terdapat pluralitas perlawanan terhadap kekuasaan. Sebagian perlawanan bersifat mungkin, perlu, mustahil; sebagian perlawanan bersifat spontan, liar, terpadu, dan merajalela dan bersifat kekerasan; tetapi sebagian perlawanan cepat untuk berkompromi, dan dikorbankan. Hal ini tidak berarti bahwa perlawanan-perlawanan tersebut hanyalah reaksi-reaksi pasif dalam kaitan dengan dominasi dasar. Perlawanan-perlawanan itu dapat memobilisasi kelompok-kelompok atau individu-individu dalam cara yang definitif dan mengorbankan bagian-bagian tertentu dari tubuh, mengorbankan saat-saat tertentu dalam hidup dan mengorbankan pula bentuk-bentuk tingkah laku tertentu. Perlawanan sedemikian bahkan kadang menjadi perpecahan radikal yang dahsyat, atau yang kita kenal dengan nama revolusi.

Setelah memberi penjelasan lanjut tentang kekuasaan *omnipresent*, Foucault kemudian menganalisis tentang mekanisme kekuasaan dengan menetapkan empat aturan. Aturan-aturan ini, menurutnya, bukan merupakan imperatif metodologis, melainkan hanya merupakan semacam “resep peringatan” tentang kekuasaan.

Pertama, “aturan imanensi” (*rule of immanence*). Aturan ini mengingatkan bahwa senantiasa terdapat hubungan antara teknik-teknik

pengetahuan dan kekuasaan. Tidak ada eksterioritas, bahkan antara teknik pengetahuan dan kekuasaan memiliki peranan-peranan khusus dan terjalin bersama pada basis perbedaan kedua bidang tersebut.

Kedua, “aturan variasi-variasi yang bersifat kontinyu” (*rule of continual variations*). Menurut Foucault, relasi pengetahuan dan kekuasaan tidak berada pada bentuk-bentuk distribusi yang statis melainkan berada pada “matriks-matriks transformasi” (*matrices of transformations*). Aspek transformatoris pengetahuan dan kekuasaan ini, dibuktikan oleh Foucault, dengan merujuk pada contoh seksualitas anak pada abad ke-19. Pada awalnya, anak-anak ditiadakan secara keseluruhan dan wacana antara orang tua dan psikiatris. Namun kemudian hari hal ini berubah dimana psikiatris mewawancarai anak-anak secara langsung, dan menyarankan agar orang tua bertanggungjawab terhadap ketidakteraturan psikis anak.²²

Ketiga, “aturan pengkondisian ganda” (*rule of double conditioning*). Menurut Foucault, “pusat-pusat kekuasaan lokal” merupakan bagian dari strategi-strategi yang lebih luas. Demikian pula semua strategi yang lebih luas mendasarkan diri pada “pusat-pusat kekuasaan lokal” tetapi yang satu tidak dapat menyamai yang lain.

Keempat, “aturan tentang pengucapan taktis dalam wacana” (*rule of the tactical polyvalence of discourses*). Menurut Foucault, dalam wacana tentang seksualitas, pengetahuan dan kekuasaan senantiasa saling bertalian. Pertalian ini merupakan hasil dari sebuah wacana. Pertalian ini tidak pernah bangkit melawan kekuasaan melainkan menyalurkan dan

²²Ibid.

menghasilkan kekuasaan, bahkan memperkuat, menyebarkan dan membuat kekuasaan itu menjadi mungkin. Dengan cara ini, sikap diam dan kerahasiaan merupakan dua tempat berteduh yang aman bagi kekuasaan. Untuk itu Foucault mengatakan: “Wacana merupakan unsur taktis atau blok yang beroperasi di bidang relasi-relasi kekuatan; bisa saja ada perbedaan dan bahkan wacana yang kontradiktoris dalam strategi yang sama; wacana-wacana itu dapat, sebaliknya, beredar tanpa mengubah bentuk dari strategi yang satu ke strategi yang lain...”²³

Foucault menyimpulkan bahwa kekuasaan sebagai kekuatan *omnipresent* tidak berbentuk hukum. Sebaliknya kekuasaan harus menggantikan hak istimewa dari hukum, dalam hal tujuannya, hak mencegah, dan hak analisis terhadap pelbagai hubungan relasi-relasi kekuasaan yang menghasilkan efek-efek dominasi. Singkatnya, dalam bahasa Foucault, “kekuasaan sebagai kekuatan *omnipresent* lebih merupakan model strategis daripada sebuah model kekuasaan yang berdasar pada hukum”.²⁴

3. Evaluasi Kritis dan Relevansi Pemikiran Foucault

Setelah melihat pemaparan tentang kekuasaan sebagai kekuatan *omnipresent*, pada bagian ini akan diberikan beberapa evaluasi kritis dan relevansi pemikiran Foucault. Pertanyaan pada bagian ini adalah: Apakah kontribusi yang dapat diambil dari pemikiran Foucault tentang kekuasaan sebagai kekuatan *omnipresent*? Apakah konsep Foucault tentang kekuasaan sedemikian sungguh-sungguh menyajikan sesuatu yang baru bagi kita?

²³Ibid., 101-102.

²⁴Ibid., 102.

3.1. Evaluasi Kritis

Foucault mulai teori kekuasaan dengan melihat kembali sejarah seksualitas khususnya pada bagian hipotesa represi seksualitas. Ia mengatakan bahwa abad ke-17 merupakan abad represi yang mencapai puncaknya pada masyarakat Viktorian dan praktek Sakramen Pengakuan Dosa dalam Gereja Katolik sesudah Konsili Trente. Dalam pemahaman Foucault, “Apa yang khusus bagi masyarakat-masyarakat modern, pada kenyataan, bukan bahwa mereka menyingkirkan sex sampai pada sebuah eksistensi yang tidak tampak, melainkan bahwa mereka membiarkan diri untuk membicarakan hal itu sebagai sebuah *infinitem* dan pada saat yang sama memanfaatkannya secara rahasia”.²⁵

Dalam komentarnya terhadap *The History of Sexuality* (vol. 1), Carol A. Pollis, mengatakan bahwa pendekatan Foucault terhadap seks secara dramatik mengubah bidang seksologi. Melalui filsafatnya, Foucault membuka sebuah cara berpikir baru tentang seks dan hubungannya dengan kekuasaan. Melalui pendekatan ini pula Foucault memunculkan masalah-masalah penting yang berhubungan dengan filsafat sejarah dan ilmu pengetahuan dalam hubungan dengan ilmu seksologi.²⁶ Model pendekatan Foucauldian, dengan demikian, memberikan kontribusi penting dengan menciptakan metode untuk mengembangkan teori dalam bidang ilmu-ilmu humaniora seperti seksologi, sejarah, sosilogi dan filsafat.

²⁵Ibid., 35.

²⁶Carol A. Pollis, “The Apparatus of Sexuality: Reflections on Foucault’s Contributions to the Study of Sex in History,” *The Journal of Sex Research*, Vol. 23, No. 3, August 1987, [journal on-line]; available from <http://www.jstor.org/stable/1812146/>; Internet; accessed 9 August 2008.

Dalam pendekatan terhadap seks dan kekuasaan, Foucault mengatakan bahwa kekuasaan bukanlah kekuatan negatif melainkan kekuatan positif yang menghasilkan segala sesuatu dari saat yang satu ke saat yang lain, berasal dari mana-mana dan berhubungan dengan segala sesuatu. Singkatnya, kekuasaan yang berlangsung dalam masyarakat kita merupakan kekuatan *omnipresent*.

Menurut Peter Digeser, konsep ini berbeda secara dramatik dari apa yang ditemukan dalam ilmu politik. Konsep ini juga tidak hanya merumuskan sebuah ide tentang kekuasaan yang berbeda secara utuh dengan sejumlah postulat yang menandai posisi kaum kiri tradisional.²⁷ Tetapi lebih dari itu, konsep ini mengkritik analisis tradisional dari ilmu politik dan filsafat yang mendasarkan dirinya pada primat produksi.²⁸ Menurut Foucault kekuasaan adalah sesuatu yang bersifat non-ekonomis. Kekuasaan merupakan sesuatu yang “tidak dimiliki melainkan

²⁷Peter Digeser, “The Fourth Face of Power,” *The Journal of Politics*, Vol. 54, No. 4, November 1992, [journal on-line]; available from <http://www.jstor.org/stable/2132105/>; Internet; accessed 9 August 2008.

²⁸Foucault criticizes Marxist’s notion of power as “economic functionality.” He says: “Economic functionality” to the extent that the role of power is essentially both to perpetuate the relation of production and to produce a class domination that is made possible by the development of the productive forces and the way they are appropriated. In this case, political power finds its historical *raison d’être* in economy. Broadly speaking... in one case a political power which finds its formal model in the process of exchange, in the economy of the circulation of goods; and in the other case, political power finds its historical *raison d’être*, the principle of its concrete form and of its actual workings in the economy.” Michel Foucault, *Society Must Be Defended*, 14.

dilaksanakan”²⁹ dan hadir hanya dalam tindakan terutama dalam relasi-relasi kekuasaan.³⁰

Foucault mengungkapkan bahwa sejarah Barat dicirikan dengan integrasi antara hukum dan kekuasaan. Kekuasaan, dengan demikian, mengungkapkan kekuasaan dari hukum monarki bahkan memainkan peranan sentral dalam bentuk-bentuk negara modern. Pandangan ini dikritisi oleh Habermas. Menurutnya, dalam identifikasi hukum-kekuasaan-monarki ini, Foucault telah mengabaikan bukan hanya beberapa ajaran kunci yang mengalir dari periode monarki yuridis, tetapi juga mengabaikan kemajuan real yang dicapai melalui “aturan hukum” dalam mengamankan relasi-relasi konstitusi politik dan dalam memenangkan jaminan kebebasan dan legalitas yang memiliki beberapa signifikansi politik, misalnya sejarah praktek pembelaan klien dalam segala aspeknya. Karena itu, menurut Habermas, dengan menghubungkan kekuasaan dengan hukum, Foucault sangat menyederhanakan kompleksitas modernisasi masyarakat-masyarakat modern sehingga paradoks-paradoks dari masyarakat yang mengganggu proses ini bahkan tidak tampak baginya.³¹ Lebih dari itu, sehubungan dengan seksualitas, Foucault juga menyederhanakan proses kompleks dari sebuah problematisasi dari hakekat internal menjadi sebuah sejarah linier.³²

²⁹Eric Paras, *Foucault 2.0. Beyond Power and Knowledge* (New York: Other Press, 2006), 79.

³⁰Michel Foucault, *Society Must Be Defended*, 15.

³¹Jürgen Habermas, *The Philosophical Discourse of Modernity: Twelve Lecturers* (Cambridge: MIT Press, 1987), 290.

³²*Ibid.*, 292.

3.2. Relevansi

Penjelasan Foucault tentang kekuasaan memberikan kepada kita sebuah kontribusi pengetahuan baru. Ia memberikan kepada kita bukan hanya sebuah alternatif radikal yang baru kepada studi ilmu sosial, seksologi, sejarah dan filsafat. Melalui filsafatnya, Foucault juga membantu setiap orang untuk memahami sebuah kekuasaan secara baru, yaitu bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang dimiliki melainkan dijalankan dalam hidup masyarakat. Itu berarti bahwa semua orang memiliki dan menjalankan kekuasaan dalam hubungan sosial dengan sesama individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok.

Konsep Foucault tentang kekuasaan mengingatkan para politisi atau kaum intelektual, bahwa kekuasaan sebagai sesuatu yang “dimiliki” cenderung bersifat *corrupt*. Praktek kekuasaan demikian sering kali menjadi sesuatu yang menakutkan dan bersifat immoral dalam bidang politik. Sebaliknya, politik yang dipahami sebagai sesuatu yang “dilaksanakan” akan membantu kita untuk membangun relasi interpersonal, bilateral dan internasional, menuju sebuah dunia yang lebih baik untuk semua umat manusia karena kekuasaan itu sendiri pertamanya berdasar pada relasi-relasi manusiawi.

Penutup

Foucault mengungkapkan bahwa kekuasaan “yuridis-diskursif” telah mendominasi masyarakat-masyarakat modern. Bentuk kekuasaan ini gagal mengungkapkan hakekat positif dan produktif dari kekuasaan karena semata-mata berdasar pada hukum dan larangan, sensor, ketaatan dan

uniformitas aparatnya. Kekuasaan demikian setara dengan hukum, dan hukum tak lain adalah kekuasaan.

Foucault menawarkan kebaruan pandangannya dengan mengatakan bahwa kekuasaan adalah multiplisitas relasi-relasi kekuatan, sebuah proses dalam relasi manusia, sebuah bantuan sekaligus strategi yang dilaksanakan dalam sebuah masyarakat tertentu. Kekuasaan ini menghasilkan segala sesuatu dari satu saat ke saat yang lain, berasal dari mana-mana dan berhubungan dengan segala sesuatu. Kekuasaan itu adalah kekuatan *omnipresent*.

Dengan menempatkan kekuasaan pada relasi manusiawi, Foucault melampaui posisi teori kaum Kiri tradisional dan kaum Marxis yang menempatkan kekuasaan pada matra ekonomi. Namun, pandangan Foucault menjadi lemah karena ia membuat identifikasi kekuasaan-hukum-monarki. Dengan identifikasi ini, ia mengabaikan kemajuan riil masyarakat demokrasi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Digester, Peter. "The Fourth Face of Power." *The Journal of Politics*, Vol. 54, No. 4, November 1992, [journal on-line]; available from <http://www.jstor.org/stable/2132105>; Internet; accessed 9 August 2008.
- Foucault, Michel. *The History of Sexuality*. Vol. 1, *An Introduction*. Translated by Robert Hurley. New York: Pantheon Books, 1978.
- _____. *Society Must Be Defended. Lecturers at the Collège de France, 1975-76*. Edited by Mauro Bertani and Alessandro Fontana. General editors Francois Ewald and Alessandro Fontana. Translated by David Macey. New York: Picador, 1997.
- _____. "Afterword. The Subject and Power." *Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics* by Hubert L. Dreyfus and Paul Rabinow. Second edition with an afterword by and an interview

with Michel Foucault. Chicago: The University of Chicago Press, 1982.

Habermas, Jürgen. *The Philosophical Discourse of Modernity. Twelve Lecturers*. Translated by Frederick Lawrence. Cambridge: MIT Press, 1987.

Paras, Eric. *Foucault 2.0. Beyond Power and Knowledge*. New York: Other Press, 2006.

Pollis, A. Carol. "The Apparatus of Sexuality: Reflections on Foucault's Contributions to the Study of Sex in History." *The Journal of Sex Research*, Vol. 23, No. 3, August 1987, [journal on-line]; available from <http://www.jstor.org/stable/2812146>; Internet; accessed 9 August 2008.